



**Program
SIAP SIAGA
Australia – Indonesia
Partnership in Disaster
Risk Management
(AIP- DRM)**

**Laporan Pembelajaran
No. 2: Penanganan
COVID-19 di Provinsi
Nusa Tenggara Timur,
Indonesia**



Disusun oleh:
Program SIAP SIAGA

Agustus 2020

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Pendapat yang disampaikan di dalam publikasi ini adalah milik sang penulis sendiri dan tidak harus merupakan pendapat dari Pemerintah Australia.

Daftar Isi

Rangkuman Lokakarya	4
Latar Belakang dan Tujuan Lokakarya	5
Latar Belakang	5
Tujuan	5
Tentang SIAP SIAGA	6
Rekomendasi	8
Tindak Lanjut	9
Lampiran 1: Daftar Peserta	10
Lampiran 2: Photos	11

Rangkuman Lokakarya

Lokakarya Pembelajaran tentang Penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan untuk menilai pembelajaran-pembelajaran dari penanganan tersebut, khususnya praktik-praktik terbaik dan untuk memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, lokakarya bertujuan untuk menilai koherensi, kejelasan dan komunikasi penanganan di dalam sistem penanggulangan bencana yang lebih luas, khususnya tentang (1) koordinasi, (2) akuntabilitas publik (data, informasi dan komunikasi), serta (3) pengembangan / pelaksanaan kebijakan.

Lokakarya menghasilkan tujuh permasalahan strategis dan rekomendasi yang terkait untuk menangani bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, yaitu (1) lemahnya pelaksanaan peraturan: kurangnya sosialisasi, tidak adanya penegakkan, kurangnya sumber daya, (2) kurang tersedianya data dan informasi tentang SOP, termasuk standar untuk komunikasi publik, 3) transparansi dan aksesibilitas informasi, (4) rendahnya kapasitas tes COVID-19, (5) kurangnya perspektif jangka panjang untuk keberlanjutan respons dan pemberdayaan komunitas, (6) kurangnya keterlibatan Ormas, lembaga-lembaga keagamaan, sektor swasta dan akademisi di dalam operasional Gugus Tugas, dan (7) sistem penanganan bencana tidak selaras dengan peraturan yang ada sekarang ini tentang penanggulangan bencana.

Akhirnya, dengan menilai penanganan melalui lensa koherensi, kejelasan dan komunikasi, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dikelompokkan ke dalam rekomendasi yang ditindaklanjuti secara jangka pendek dan jangka panjang dan tidak hanya untuk COVID-19 tapi juga untuk perbaikan dan peningkatan penanggulangan bencana secara jangka panjang..

Latar Belakang dan Tujuan Lokakarya

Latar Belakang

Sejak dikonfirmasi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret, 2020, serta ditunjuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memimpin Gugus Tugas Nasional pada tanggal 13 Maret (Perpres No. 7 Tahun 2020) SIAP SIAGA telah bergeser untuk memberikan dukungan kepada BNPB dan kementerian kunci pemerintah lainnya, serta gugus tugas provinsi di Bali dan NTT, untuk mengelola penanganan COVID-19. Fokus utama dukungan ini adalah memperkuat sistem penanggulangan bencana untuk mengakomodasi penanganan sebuah pandemi.

Pemerintah Provinsi NTT membentuk Gugus Tugasnya pada 13 Maret 2020, sebelum adanya konfirmasi kasus di provinsi tersebut, melalui SK Gubernur 121/KEP/HK/2020, dan direvisi dengan SK Gubernur 152/KEP/HK/2020 untuk menyesuaikan dengan peraturan di tingkat nasional. Gugus Tugas ini dikepalai oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda dibantu oleh Kepala Kanwil Kesehatan yang tugas utamanya adalah menangani aspek kesehatan / medis, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tugas utamanya adalah menangani aspek non-medis, termasuk pencegahan, koordinasi dan logistik. Sekretariatnya berada di Kantor Wilayah Dinas Kesehatan.

Sejak akhir Mei 2020, pemerintah pusat dan daerah mulai mendiskusikan fase 'normal baru' untuk mencegah kerugian ekonomi lebih lanjut. Di NTT, fase ini dimulai dari Pergub No 26 Tahun 2020 tentang Orde Normal Baru di Provinsi NTT. Walau penanganan COVID-19 terus berlangsung, peraturan ini mengidentifikasi patokan-patokan serta ruang untuk melakukan refleksi terkait pencegahan dan penanganan COVID-19, khususnya oleh Gugus Tugas NTT. Dengan mempertimbangkan hal ini, BPBD NTT, dengan dukungan dari SIAP SIAGA, menyelenggarakan sebuah lokakarya tentang Pembelajaran dari Operasional Gugus Tugas COVID-19 di NTT.

Tujuan

Lokakarya ini berfokus untuk mengidentifikasi pembelajaran, praktik-praktik terbaik serta rekomendasi dari pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Provinsi NTT dengan menggunakan pendekatan panel dan diskusi.

Tujuan-tujuan spesifiknya adalah:

1. Berbagi dan belajar dari pengalaman di dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di NTT;
2. Mengidentifikasi praktik baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan demi penanganan darurat yang lebih efektif di masa depan; dan
3. Merumuskan dan menyepakati rekomendasi-rekomendasi bersama.

Rekomendasi-rekomendasi dari lokakarya juga dalam digunakan untuk pelaksanaan fase Normal Baru.

Lokakarya ini dibagi menjadi dua fase:

a. *Diskusi Panel*

Diskusi panel bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran umum dari perspektif-perspektif yang berbeda tentang praktik terbaik dan apa yang harus ditingkatkan serta apa yang harus dihindari di masa mendatang. Masing-masing pembicara mendapatkan sebuah pertanyaan yang memastikan bahan yang mereka sampaikan memenuhi persyaratan lokakarya.

b. *Cafe Dunia*

Bagian kedua lokakarya awalnya direncanakan sebagai diskusi kelompok, tapi untuk mendapatkan keikutsertaan lebih mendalam di tiap-tiap topik, diskusi ini diubah menjadi "cafe dunia." Acara dibagi menjadi tiga topik: data, informasi dan komunikasi, koordinasi dan kebijakan publik.

Tentang SIAP SIAGA

Diluncurkan pada November 2019, SIAP SIAGA didanai oleh Pemerintah Australia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) dan dikelola oleh Palladium. Program lima tahun yang bernilai 25 Juta Dolar Australia ini bertujuan untuk memperkuat penanggulangan risiko bencana di Indonesia dan hubungan antara Australia dan Indonesia. Program memiliki fokus domestik untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mencegah, mempersiapkan, melakukan respons dan pemulihan terhadap bencana-bencana yang muncul baik secara cepat mau pun perlahan; serta fokus regional untuk memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam hal permasalahan kemanusiaan regional.

Dengan bekerja di tingkat nasional dan daerah, SIAP SIAGA mendukung prioritas Pemerintah Indonesia terkait Penanggulangan Risiko Bencana yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) serta Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia 2015-2045. Selaras dengan komitmen Pemerintah untuk pendekatan *pentahelix*, SIAP SIAGA juga bermitra dengan organisasi masyarakat, akademisi, mitra-mitra pembangunan, dan media untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana.

Temuan-Temuan Lokakarya

Temuan

Permasalahan strategis diidentifikasi berdasarkan kata-kata kunci muncul dari diskusi panel dan *cafe dunia*.

1. Walaupun beberapa kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan, **pelaksanaannya lemah**. Ini karena: a) kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat; b) kurangnya penegakkan hukum atau disiplin serta monitoring pelaksanaan kebijakan; dan c) kurang memadainya sumber daya untuk melaksanakan kebijakan. Sebagai contoh, kebijakan tentang pemusatan karantina tidak dapat dilaksanakan di semua kabupaten karena kurangnya anggaran untuk biaya operasionalnya.
2. **Data dan informasi SOP tidak tersedia, termasuk standar untuk komunikasi publik**. Walaupun SOP-SOP telah dikembangkan di tingkat nasional, tapi masih belum diterjemahkan untuk pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat diterapkan di desa-desa, selain dari pada memasukkan data pengamatan yang dilakukan kantor dinas kesehatan yang kemudian dikirimkan ke Kanwil Kesehatan. Ini menyebabkan timbulnya pengumpulan data yang tidak standar serta manajemen data yang buruk, yang akhirnya tidak dapat menjadi bahan pembuatan kebijakan (berakibat pada kebijakan menjadi tidak relevan / tidak sesuai kebutuhan di lapangan) dan menyebabkan terjadinya komunikasi yang tidak tepat. Sebagai contoh, ketika gubernur melarang diumumkannya hasil RDT, keputusannya tidak didasarkan pada SOP atau peraturan yang jelas, sehingga keberatan muncul dari beberapa kabupaten. Contoh lainnya adalah buruknya pengintegrasian data logistik dan kesehatan untuk mendukung keputusan tentang pengalokasian sumber daya.
3. **Transparansi dan aksesibilitas informasi** juga menjadi permasalahan strategis. Walau telah ada situs COVID-19: covid19.nttprov.go.id serta konferensi pers setiap harinya, data dan informasi yang diterbitkan terbatas pada data pengawasan. Kurangnya transparansi tentang pelacakan berakibat, sebagai contoh, rendahnya kesadaran masyarakat akan sejauh mana virus menyebar. Lebih lanjut lagi, data dan informasi tidak dapat mencapai sebagian besar masyarakat, karena banyak desa-desa memiliki akses internet dan listrik yang terbatas. Sebagian besar data dan informasi dari pemerintah disampaikan melalui media sosial yang hanya dapat diakses menggunakan telepon pintar dan memerlukan akses internet. Memang terdapat beberapa upaya dari pihak pemerintah untuk menggapai mereka tanpa akses internet untuk memberikan informasi yang akurat / terkini. Ini berakibat pada tersebarnya sejumlah berita palsu, stigma terhadap para pasien, kasus-kasus dugaan dan kemungkinan – yang membuat orang semakin menghindari untuk memberitahukan tentang faktor-faktor risiko dan / atau gejala-gejala mereka. Para peserta lokakarya menyoroti beberapa potensi solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan jejaring kerja dan media yang lebih beragam, menggunakan TNI dan Kepolisian serta lembaga-lembaga keagamaan dan LSM untuk membantu menyebarkan data / informasi. Lembaga-lembaga ini biasanya sudah memiliki jejaring kerja hingga ke desa-desa yang belum memiliki akses internet.
4. **Kapasitas tes COVID-19 masih rendah** dan merupakan yang terendah dari semua provinsi di Indonesia. Tantangan utama adalah ketersediaan laboratorium, spesimen yang harus dihantarkan dari kabupaten-kabupaten ke Kupang dan ke Jakarta, ketersediaan reagen untuk tes, dll. Rendahnya kapasitas tes COVID-19 berdampak pada kesadaran publik dan disiplin kesehatan pada fase normal baru. Kapasitas tes yang terbatas ini juga membatasi pengambilan keputusan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan daerah-daerah serta kelompok-kelompok tertentu. Ini memerlukan intervensi kebijakan dan pengalokasian anggaran yang serius.
5. Banyak peserta menyoroti perlunya perspektif jangka panjang terkait permasalahan **keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat**, khususnya pada fase normal baru. Tidak ada

kebijakan/transformasi untuk memastikan setiap orang mendapatkan akses air untuk cuci tangan, perubahan perilaku demi kebersihan, akses air bersih di fasilitas-fasilitas publik, khususnya pasar-pasar tradisional, penggunaan masker secara rutin, penjagaan jarak, dll. Walau terdapat contoh karantina fasilitas di tingkat desa dan RT/RW dengan menggunakan sumber daya sendiri, ini hendaknya tidak dijadikan kebijakan karantina oleh pemerintah provinsi.

6. Permasalahan tentang **koordinasi yang lebih luas** juga menjadi sebuah permasalahan strategi. Peserta lokakarya menghargai koordinasi antara Gugus Tugas, yang dipimpin Sekda Provinsi, dan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten yang dipimpin oleh Gubernur. Akan tetapi, walau Keputusan Gubernur memasukkan lembaga swadaya masyarakat tertentu untuk menjadi anggota Gugus Tugas, LSM ini tidak dilibatkan di dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan. Di sisi lain, ada beberapa organisasi yang aktif yang tidak dimasukkan ke dalam Gugus Tugas, seperti Palang Merah Indonesia dan Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT. Terlebih lagi, banyak organisasi yang aktif melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terkait COVID-19, tetapi tidak berkoordinasi dan bekerja sama dengan Gugus Tugas.
7. **Sistem penanganan** bencana, baik penanganan darurat atau transisi menuju pemulihan, **tidak selaras dengan peraturan yang ada sekarang tentang penanggulangan bencana**, termasuk pengaturan. Sebagai contoh, penanganan keadaan darurat, yang memerlukan koordinasi yang kuat, dan BPBD tidak memegang fungsi ini, walau memiliki mandat yang luar untuk mengkoordinasi perencanaan penanggulangan bencana, dll. Tidak adanya rencana kontinjensi telah diterima dan dipahami sebagai akibat dari permasalahan ini, serta karena kurangnya pemahaman dari semua pihak terkait peraturan penanggulangan bencana yang ada sekarang.

Rekomendasi

Rekomendasi didasarkan atas pembelajaran didapatkan dari kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 tapi juga relevan terhadap penanganan yang bukan hanya COVID-19 / pandemi karena ini terkait dengan perbaikan dan peningkatan sistem penanggulangan bencana untuk jangka panjang. Untuk memahami bagaimana rekomendasi-rekomendasi ini dapat menjadi masukan terbaik bagi Pemerintah Provinsi NTT, maka kemudian dipetakan terhadap bagian-bagian Rencana Kerja Jangka Menengah NTT (2018-2023) yang terkait dan dengan Rencana Strategis BPBD NTT (2018-2023) untuk mengidentifikasi di mana rekomendasi-rekomendasi ini yang paling memberikan nilai tambah.

Rekomendasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018-2023	Rencana Strategis BPBD NTT 2018-2023
Meningkatkan sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang COVID-19 dan penanggulangan bencana dengan memaksimalkan semua opsi media yang ada dan memastikan dapat mencapai kelompok/desa yang terisolir. Juga penting untuk mendidik masyarakat untuk mengurangi stigma dan berita bohong.	Nilai tambah untuk Misi III : meningkatkan ketersediaan dan mutu untuk mempercepat pembangunan. Strategi: meningkatkan mutu dan kapasitas infrastruktur komunikasi.	Nilai tambah untuk Permasalahan Strategis : sosialisasi informasi bencana yang buruk.
Meningkatkan sistem data, informasi dan komunikasi publik tentang COVID-19 dan bencana lainnya, khususnya demi kekonsistenan antara instansi di tingkat nasional dengan di provinsi dan kabupaten / kota serta sektor lain yang terkait. Ini akan memastikan bahwa data dan informasi dikumpulkan secara komprehensif (lintas sektor), mendukung analisis, dikomunikasikan ke publik dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, baik untuk perencanaan penanggulangan	Nilai tambah untuk Misi I : Untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil, mandiri dan sejahtera. Tujuan 2: meningkatkan akses untuk perumahan yang layak bagi kaum miskin dengan menggunakan koordinasi lintas sektoral untuk menyelaraskan data kemiskinan. Program layanan sosial dengan indikator persentase warga miskin, masyarakat adat yang terisolir, kelompok-kelompok rentan, dan lainnya yang memenuhi persyaratan	Nilai tambah untuk Permasalahan Strategis : Tidak adanya indikator-indikator monitoring dan koordinasi dari instansi terkait untuk permasalahan bencana; tidak adanya analisis data dan informasi pada saat bencana; dan tidak adanya sinergi di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan bencana.

bencana, penanganan dawat darurat, dan pemulihan.	untuk program perlindungan sosial (memerlukan pemilahan data berdasarkan gender).	
Perlu mempercepat kapasitas untuk melakukan pelacakan dan tes di Provinsi.	Nilai tambah untuk Misi IV : Meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat.	
Masyarakat perlu lebih terlibat di dalam pelaksanaan transisi ke 'normal baru', termasuk melalui monitoring independen oleh masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, mendorong inisiatif kreatif komunitas untuk membantu masyarakat mengadaptasi gaya hidup dan pencaharian mereka, serta mendorong pendanaan mandiri atau menggunakan dana desa, khususnya untuk perubahan perilaku, lebih khusus lagi para permasalahan-permasalahan kebersihan dan kesehatan.	Nilai tambah untuk Misi I : Menciptakan masyarakat yang adil, mandiri dan sejahtera dengan menjadikan transparansi dan inklusi sebagai prinsipnya, dengan mendorong keikutsertaan semua pemangku kepentingan.	Nilai tambah untuk Kegiatan : meningkatkan keikutsertaan masyarakat di dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanganan COVID-19, serta penanggulangan bencana secara lebih luas, dengan menggunakan platform / konsep <i>pentahelix</i> . Ini dapat direplikasikan di semua tingkatan, hingga ke tingkat kecamatan dan desa.	Nilai tambah untuk Misi III : menciptakan sumber daya manusia yang bermutu melalui kemitraan antara pemerintah, komunitas dan sektor swasta untuk mengembangkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.	Nilai tambah untuk penanganan akar penyebab dari permasalahan strategis : tidak adanya monitoring dan koordinasi bencana terkait dengan indikator kinerja para mitra.
Fokus pada penguatan sistem penanggulangan bencana, khususnya pada kesiapsiagaan dan gawat darurat, seperti pengembangan rencana kontinjensi dan penjangkauan, untuk memitigasi dampak yang diperparah oleh krisis, seperti pada COVID-19.	Nilai tambah untuk Aspek Penanggulangan Bencana : Indikator Kinerja (1) rencana kontinjensi tambahan dan sistem peringatan dini, (2) jumlah kabupaten dengan RPB dan (3) meningkatnya jumlah desa berketahanan; dan Aspek Lingkungan Hidup : meningkatnya risiko bencana dikarenakan tidak adanya langkah-langkah kesiapsiagaan bencana.	

Tindak Lanjut

Terdapat rencana tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek antara lain:

1. Mendiskusikan pembelajaran dengan pihak Sekda dan BPBD untuk mendorong dan mendukung aksi di dalam kerangka kerja dokumen-dokumen perencanaan pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan, memperluas jangkauan informasi dan keterlibatan komunitas di dalam pelaksanaan normal baru; dan
2. Memfasilitasi pembelajaran yang lebih dalam di tingkat kabupaten / kota dan mengembangkan studi kasus untuk mendokumentasikan dan belajar dari pengalaman COVID-19.

Rencana jangka panjang adalah untuk memberikan rekomendasi kepada rencana kerja pemerintah untuk memperkuat penanggulangan bencana yang sejalan dengan pendekatan sistem, dengan berfokus kepada penanganan darurat dan peningkatan kapasitas BPBD dengan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan *pentahelix*.

Lampiran 1: Daftar Peserta

No	Nama	Gender	Lembaga
1	M. Th. Rosany Mbindy	F	RSUD Johannes Kupang
2	Aghawaty	F	DP3A Prov. NTT
3	Okto Nenobesi	M	Diskominfo
4	Agustinus Taek	M	PMI Kupang
5	Mayor CKM dr. Mursyid	M	Dirut RST Wirasakti
6	Adriyani Nahak Seran	F	RSU Siloam Kupang
7	Murniyati Djou	F	Dinkes Kota Kupang
8	R. Krisna B, SH, SIK, MH	M	Polda NTT
9	Markus Riwu	M	Kantor Kesehatan Pelabuhan
10	Ermie Ndoen	M	UNICEF
11	Petter G. U	M	Korem 161/WS
12	Stevie Jo	M	Victory News (V.N)
13	Stefanus Kosat	M	Victory News (V.N)
14	Acep Effendi	M	Dinkes Prov. NTT
15	Siprianus Tua	M	Dinas P & K
16	Else Hayer	F	BPBD Prov. NTT
17	Sarah Lery Mboeik	F	PIAR NTT
18	Patrick Andriyani	F	Ba.Kesbangpol
19	Veronica Johannis	F	BPBD Prov. NTT
20	Sintus Karolus	M	BPBD Prov. NTT
21	Tonda S. Sirait	M	BAPPELITBANGDA NTT
22	Madaris Dethan	F	BPBD Prov. NTT
23	Silvester Ladolima	M	Dinkes Prov. NTT
24	Vran Y. Sabu, SH	M	Korem 161/WS
25	L. Sulaksono	M	BPBD Prov. NTT
26	Nasir Baki	M	BPBD Prov. NTT
27	Ryan Radamuti	M	BPBD Prov. NTT
28	Silvia Fanggidae	F	SIAP SIAGA NTT
29	Paul Kolo	M	Dinsos Prov. NTT
30	Buce Ga	M	Forum PRB

Lampiran 2: Photos



Sesi Pembukaan Lokakarya Pembelajaran NTT



Peserta Lokakarya Pembelajaran NTT



Temuan untuk Data dan Informasi



Sesi Diskusi Kelompok Terpumpun



Sesi Berbagi *World Cafe*